

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sektor penting dalam pembangunan bangsa, melalui pendidikan kita menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengisi pembangunan bangsa ke depan. Pentingnya pendidikan sebagai pilar pembangunan secara tegas tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Sesuai alinea ke-4 salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah Menercaskan Kehidupan Bangsa. Cerdas dalam semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia menyelenggarakan pendidikan dalam satu sistem pendidikan nasional.¹

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Di sisi lain, Pemerintah menyelenggarakan dua bentuk sistem pendidikan, yakni 1) sistem pendidikan yang berorientasi pada pendidikan keilmuan dan skill, yakni sekolah, dan 2) sistem pendidikan yang mempertahankan pendidikan agama sebagai ciri khasnya, yakni sekolah. Kedua bentuk pendidikan ini diselenggarakan dan dikelola oleh

¹ Faridah Alawiyah, "Pendidikan Madrasah di Indonesia", *Aspirasi*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014: 51.

pemerintah,² serta diakui sebagai institusi pendidikan dalam sistem pendidikan Nasional di Indonesia.³ Dalam pasal 18 disebutkan pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), sekolah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.⁴

Jika dilihat dari status, lembaga pendidikan/ sekolah terbagi menjadi dua yaitu; sekolah Swasta dan sekolah Negeri. Baik Sekolah Negeri maupun sekolah Swasta memiliki karakteristik tersendiri, sehingga dengan demikian akan menampilkan perbedaan satu sama lain.⁵ Penyelenggaraan sekolah swasta di Indonesia dilakukan oleh beragam pihak dengan berbagai corak, diantaranya dengan latar belakang keagamaan. Dalam kaca mata hukum, keberadaan sekolah swasta tersirat dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Pasal 54 ayat (1) dalam UU tersebut menyatakan bahwa: “peran serta dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan

² E. Kurniyati, “Memahami Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia.” Rausyan Fikr, Volume 14, Nomor 1, (2018), 2.

³ E. Kurniyati, *Memahami Dikotomi*, 13.

⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Bidang Pendidikan* (Jakarta: Kemendikbud, 2011), 10.

⁵ Hamka, “Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta; Monopoli dalam Pendidikan”, *Jurnal el-Idare*, Vol. I, No. 2, Desember (tt.): 219.

pengendalian mutu layanan pendidikan”. Selain itu, ditekankan juga dalam pasal 55 ayat (1), bahwa “masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat”.⁶

Sistem pendidikan yang dibangun di Indonesia memungkinkan Kementerian Pendidikan Nasional mempunyai kewenangan dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan hadirnya Peraturan Menteri Pendidikan, seperti Permendiknas tentang Pembinaan Kesiswaan (No. 39 Tahun 2008), Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru (No. 18 Tahun 2016), Pakaian Seragam bagi Peserta Didik (No. 45 Tahun 2014), Penilaian Hasil Belajar (No. 4 Tahun 2018), Implementasi Kurikulum (No. 81A Tahun 2013). Semua Peraturan ini dijadikan landasan yuridis dalam mengatur sumber daya peserta didik yang dilakukan oleh sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan secara umum.

Salah satu ciri sekolah yang bermutu adalah dapat merespons kepercayaan masyarakat, seperti bagaimana pihak sekolah mampu memberikan pelayanan yang terbaik sehingga menghasilkan anak-anak yang bermutu dalam segala hal. Mengingat perkembangan dunia IPTEK serta era globalisasi ini, maka tujuan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan

⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Bidang Pendidikan* (Jakarta: Kemendikbud, 2011), 27.

tuntutan masyarakat, pihak sekolah perlu melakukan pembenahan-pembenahan dalam hal sumber daya manusia yang profesional, manajemen yang handal, kegiatan belajar-mengajar yang berkualitas, dan lain sebagainya.⁷

Sebagai suatu organisasi, lembaga pendidikan memerlukan tidak hanya seorang manajer untuk mengelola sumber daya lembaga pendidikan yang lebih banyak berkonsentrasi pada permasalahan anggaran dan persoalan administratif lainnya, tetapi juga memerlukan pimpinan yang mampu menciptakan sebuah visi dan mengilhami staf dan semua komponen individu yang terkait dengan lembaga pendidikan.⁸ Seorang pemimpin dalam lingkup pendidikan tiada lain adalah kepala sekolah, merupakan pimpinan tunggal di sekolah yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk mengatur, mengelola dan menyelenggarakan kegiatan di sekolah, agar apa yang menjadi tujuan sekolah dapat tercapai. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.⁹

Secara umum, kepala sekolah sebagai figur kunci dalam mendorong perkembangan dan kemajuan sekolah. Kepala sekolah tidak hanya

⁷ Hengki Wijaya, “Analisis SWOT tentang Pembinaan Kesiswaan dan Pengembangan Program Pembinaan Kesiswaan”, 1.

⁸ Abd. Wahab & Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual* (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2016), 114.

⁹ Andang, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2014), 54-55.

meningkatkan tanggung jawab dan otoritasnya dalam program-program sekolah, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas keberhasilan siswa dan programnya. Kepala sekolah harus pandai dalam memimpin kelompok dan pendelegasian tugas dan wewenang.¹⁰

Berdasarkan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional, dapat dimaknai bahwa dalam proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler hendaknya mampu mengembangkan beragam kecerdasan peserta didik secara menyeluruh dan seimbang, yang meliputi:¹¹

1. Kecerdasan *spiritual* (olah hati); untuk memperteguh keimanan dan ketaqwaan, meningkatkan akhlak mulai, budi pekerti atau moral dan enterpreneurship.
2. Kecerdasan *intelektual* (olahpikir); untuk membangun kompetensi dan kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Kecerdasan *emosional* (olahrasa); untuk meningkatkan sensitivitas, daya apresiasi, daya kreasi, serta daya ekspresi seni dan budaya.
4. Kecerdasan *kinestetis* (olahraga); untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, daya

¹⁰ Ardhana Januar Mahardani, “Kepemimpinan Ideal Kepala Sekolah”, Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran, Vol. 3, No. 2, Juli (2015): 2.

¹¹ Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (Dit. PSMA), “Pedoman Pembinaan Kesiswaan”, 1.

tahan, kesigapan fisik, dan keterampilan kinestetis.

Kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler merupakan bentuk kegiatan yang pada dasarnya untuk memacu siswa menjadi semakin cerdas. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatannya harus sinergi dengan kegiatan intrakurikuler dalam mencapai tujuan pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan secara operasional diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008.¹²

Pembinaan kesiswaan dilakukan agar peserta didik mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang. Pembinaan kesiswaan ini diatur dalam Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008.¹³ Dalam pasal 3, ayat 2 disebutkan bahwa materi pembinaan kesiswaan meliputi:

- (1) *Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;*
- (2) *Budi pekerti luhur atau akhlak mulia;*
- (3) *Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara;*
- (4) *Prestasi akademik, seni, dan/ atau olahraga sesuai bakat dan minat;*
- (5) *Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan*

¹² Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (Dit. PSMA), "*Pedoman Pembinaan Kesiswaan*", 2.

¹³ *Peraturan Pemerintah tentang Guru* (Jakarta: CV Eko Jaya, 2008), 279.

toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural;

- (6) *Kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan;*
- (7) *Kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi;*
- (8) *Sastra dan budaya;*
- (9) *Teknologi informasi dan komunikasi;*
- (10) *Komunikasi dalam bahasa Inggris;*

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa tentang peran kepala sekolah dalam implementasi Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008. Sebab dari hasil pengamatan sementara yang penulis lakukan diketahui bahwa dalam pelaksanaannya kepala sekolah belum mengimplementasikan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 secara menyeluruh jika diterapkan di sekolah. Oleh karena itu peneliti mengangkat penelitian dengan judul: **“PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI PERMENDIKNAS NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KESISWAAN”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang diteliti adalah Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 di SMA Islam Jepara. Berdasarkan fokus masalah penelitian yang telah dikemukakan, maka subfokus penelitian sebagai berikut:

1. Peran kepala SMA Islam Jepara dalam pembinaan kesiswaan.

2. Implementasi Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 di SMA Islam Jepara.
3. Keberhasilan kepala SMA Islam Jepara dalam Implementasi Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan dan rumusan masalah adalah dua istilah yang nampak sama tetapi sebenarnya sangat berbeda. Permasalahan adalah ketidaksesuaian antara harapan dan realitas, sedangkan rumusan masalah adalah sebuah atau beberapa pertanyaan yang dirumuskan untuk dicarikan jawabannya melalui riset atau pengumpulan data.¹⁴ Namun demikian, rumusan masalah lahir karena adanya masalah-masalah yang muncul di lapangan penelitian. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana peran kepala SMA Islam Jepara pembinaan kesiswaan?
2. Bagaimana implementasi Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 di SMA Islam Jepara?
3. Sejauh mana keberhasilan kepala SMA Islam Jepara dalam Implementasi Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008?

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 55.

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan.¹⁵ Penelitian dalam proposal tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran kepala sekolah dalam implementasi Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 di SMA Islam Jepara.

Dalam segala aktifitas yang dilakukan peneliti setidaknya harus mempunyai sebuah tujuan dan sasaran secara jelas, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diajukan. Adapun tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran kepala SMA Islam Jepara pembinaan kesiswaan.
2. Mengetahui implementasi Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 di SMA Islam Jepara.
3. Mengetahui keberhasilan kepala SMA Islam Jepara dalam Implementasi Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008.

E. Manfaat Penelitian

Beberapa hal yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian peran kepala sekolah dalam implementasi Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara keilmuan penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan bahan kajian pada peran kepala sekolah dalam

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 397.

implementasi Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008.

- b. Secara umum mampu memberikan sumbangan pengetahuan dalam rangka peningkatan kualitas lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dalam implementasi Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi lembaga yang diteliti, sebagai masukan dalam implementasi Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 yang di lakukan oleh kepala Sekolah.
- b. Bagi kepala sekolah, sebagai bahan referensi dalam implementasi Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 untuk meningkatkan kualitas lembaga yang dipimpinnya.
- c. Bagi guru, sebagai pertimbangan untuk menambah wawasan tentang implementasi Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008.
- d. Bagi sekolah lainnya, diharapkan menjadi *input* atau sumbangan pemikiran yang konstruktif dalam usaha implementasi Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008.
- e. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan pada implementasi Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 yang dilakukan oleh kepala sekolah.

Bagi peneliti selanjutnya, memungkinkan dilakukannya penelitian dan pengembangan lebih lanjut tentang peran kepala

sekolah dalam implementasi Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis tentang “Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan” akan dibagi menjadi lima bab, dimana masing-masing bab disusun berdasarkan secara rinci sesuai dengan alur penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dan penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : KAJIAN TEORI, yang terdiri dari: konsep Kepala Sekolah (pengertian kepala sekolah, kepala sekolah ideal, kepala sekolah di era otonomi, kemampuan manajerial kepala sekolah, dan keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah); Peran Kepala Sekolah menurut Kemendiknas (kepala sekolah sebagai educator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator, dan motivator); Kepala Sekolah dan Permendiknas RI No.39 Tahun 2008 (Latar Belakang Lahirnya Permendiknas RI No.39 Tahun 2008, Jenis-Jenis Pembinaan Kesiswaan, Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Permendiknas RI No. 39 Tahun 2008); Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teoritik.

BAB III : METODE PENELITIAN, yang terdiri dari: Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subyek dan Obyek Penelitian, Sumber Data, Instrumen Penelitian,

Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data dan Teknis Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang terdiri dari: Deskripsi Obyek Penelitian (Identitas Sekolah, Visi, Misi dan Tujuan SMA Islam Jepara dan Data Pendidik dan Kependidikan SMA Islam Jepara); Hasil, Analisis dan Pembahasan Penelitian di SMA Islam Jepara (Peran Kepala Sekolah dalam Pembinaan Kesiswaan, Implementasi Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan dan Keberhasilan Kepala Sekolah dalam Implementasi Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan)

BAB V : PENUTUP, yang terdiri dari: Kesimpulan penelitian dan Saran.

